

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda negara Indonesia memberikan jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten dan kota (Mardiasmo, 2002:3). Akibat dari reformasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Undang-Undang itu adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dengan kedua Undang - Undang ini diharapkan membawa dampak yang baik bagi Negara Indonesia. khususnya dalam hal tata pemerintahan dan tata keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kemudain membawa bangsa Indonesia menuju kearah yang lebih baik yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi, telah menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*) Kebijakan *good government governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik, Yang disadari hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan media dan proses untuk mewujudkannya. Tuntutan transparansi public, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditunjukkan kepada para

manajer pemerintahan di daerah. Seiring dengan itu PP 105 tahun 2000 mensyaratkan pula pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan (Neraca daerah, Laporan arus Kas, dan Laporan Realisasi Anggaran). Salah satu alat yang dipergunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan adalah rasio. Karena dapat menunjukkan hubungan antara data-data keuangan yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan. Mengingat pentingnya menganalisis laporan keuangan dalam suatu pemerintahan, yang bertujuan untuk penyusunan rencana yang lebih baik penentuan kebijakan yang lebih tepat, serta untuk mengetahui tingkat kinerja. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Besaran Rasio BHPRD (Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah) Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDES) Di Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perangkat Desa yang masih belum terlalu memahami teknis terkait dengan besaran rasio APBDes terhadap BHPRD.
2. Perangkat Desa masih kurang transparan terhadap masyarakat khususnya mengenai besaran rasio keuangan Desa .
3. Masyarakat belum kritis terhadap proses besaran rasio keuangan Desa khususnya dalam APBDes .

1.3 Rumusan Masalah

- a) Mengapa perangkat Desa belum memahami teknis besaran rasio APBDes terhadap BHPRD di Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ?
- b) Bagaimana besaran rasio APBDes terhadap BHPRD di Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait perangkat Desa yang belum memahami besaran rasio APBDes terhadap di Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk menganalisis besaran rasio APBDes terhadap BHPRD di Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis
Menambah wawasan pengetahuan ilmu khususnya terkait pemerintahan mengenai permasalahan BHPRD.
- b. Bagi Eksternal (Pemerintahan)
Sebagai saran atau bahan masukan dan pengkoreksian untuk instansi pejabat pemerintahan Desa tentang BHPRD.
- c. Bagi Internal (Akademisi)
Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik dengan kajian mengenai BHPRD.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

a. Rasio BHPRD

1) Pengertian Rasio

Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode (sebagai penyebut)

Pengertian rasio dalam ilmu akuntansi berkaitan dengan keuangan yaitu membandingkan angka pada laporan keuangan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. Rasio dapat diketahui lewat laporan neraca (posisi keuangan) maupun laporan laba rugi perusahaan, teknik yang digunakan dikenal sebagai metode analisis keuangan

2) Pengertian BHPRD

BHPRD adalah suatu pembagian hasil setiap daerah yang berasal dari pemerintahan Desa yang dibagikan kepada warga yang terkena dampak PHK ataupun warga dalam taraf rendah ekonominya dibagikan di setiap daerah. Biasanya BPRHD ini dianggarkan dalam satu periode (satu tahun) dalam suatu pemerintahan Desa.

3) Rumus Rasio BHPRD

BHPRD membagikan dana untuk APBDes, yang bertujuan untuk menambah pemasukkan anggaran Desa, yang disitu ditujukan untuk: Operasional Pemerintahan Desa 30%, pembangunan 30%, kegiatan Desa dan dana untuk masyarakat yang terdampak PHK 40%. Adapun Rumus Rasio BHPRD sebagai berikut:

Rasio BHPRD =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Dana BPHRD}} \times 100$$

4) Indikator BHPRD

Operasional Pemerintahan Desa 30%, pembangunan 30%, kegiatan Desa dan dana untuk masyarakat yang terdampak PHK 40%

Tabel 2. 1

Tingkat BPRHD dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	BHPRD %
Rendah Sekali	0-25%
Rendah	25-50%
Sedang	50-75%
Tinggi	75-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk,2019)

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa rasio BHPRD adalah perhitungan pembagian keuangan yang berasal dari pemerintahan Desa/daerah yang dibagikan ke setiap Desa yang diperuntukkan kepada

warga yang terkena dampak PHK maupun ekonominya yang rendah. PKH (Program Keluarga Harapan) diperuntukan kepada warga yg memiliki anak dengan tanggungan biaya sekolah terkhusus diberikan kepada yang memiliki kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar). Sedangkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) diberikan kepada masyarakat miskin/tidak mampu, maupun warga yang sudah lanjut Usia.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1) Pengertian APBDes

APBDes merupakan proses perencanaan keuangan tahunan pemerintahan dalam Desa yang telah dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Daerah yang ditetapkan dengan adanya peraturan Desa yang meliputi pendapatan , belanja, dan pembiayaan. Adanya APBDes pelaksanaan pemerintah Desa akan memiliki rencana yang strategis dan dapat diukur berdasarkan tentang anggaran yang sudah ditetapkan dan akan digunakan (Aulia, 2021: 98).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

APBDes adalah suatu pertanggung jawaban yang dipegang oleh manajemen Desa untuk memberikan informasi tentang semua aktifitas kegiatan Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa atas pengelolaan dana keuangan Desa dan pelaksanaan berupa rencana –rencana program yang dibiayai dengan uang Desa

2) Pendapatan Asli Daerah

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Fungsi-fungsi APBDes

1) Alat Perencanaan

Anggaran adalah alat pengendali manajemen Desa dalam rangka mencapai tujuan Anggaran Desa digunakan untuk merencanakan

kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan akan diperoleh oleh Desa.

2) Alat Pengendali

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran Desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, Desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijelaskan Desa, dengan demikian akan mudah memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4) Alat Kordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan kordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat Desa.

5) Alat Penilaian Kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat Desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

6) Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat Desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.

4) Laporan Keuangan Desa

laporan Keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan Desa menurut pemendagri No.113 tahun 2004 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah Desa berupa (U. hasanah, 22: 2020)

- a) Laporan realisasi anggaran
- b) Buku kas
- c) Buku pajak
- d) Laporan bank
- e) Laporan realisasi anggaran

Demikian, dari sudut pandang akuntansi dapat disusun dengan laporan tambahan, yaitu laporan keuangan perubahan ekuitas dana (untuk entitas Desa secara keseluruhan) atau laporan perubahan rekening dari pemerintahan daerah.

Sebagaimana halnya laporan ada pemasukan dari BHPRD yang pastinya menambah anggaran dari daerah ke Desa, dengan menambahnya anggaran tersebut pemerintahan Desa harus teliti dalam menggunakan uang dari Desa yang bersumber dari BHPRD karena pada akhirnya nanti

pemerintahan Desa harus membuat laporan keuangan secara rinci dan detail.

Nota perhitungan APBDES berisi ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta laporan keuangan Desa selama periode akuntansi pada tahun yang sedang berlangsung. Laporan keuangan antara lain mencakup tentang pemasukkan dari BHPRD, yang dimana pemasukkan tersebut bisa menambah anggaran Desa dalam pelaksanaan program dalam satu tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Maharani	2015	Analisis Kinerja Tingkat kemandirian pemda kota Batu	Analisis Metode Deskriptif	Kinerja tingkat kemandirian pemda kota batu rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti pemda kota Batu cenderung memiliki ketergantungan financial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat
2.	Nur Amelia arifatun, Yulianto C.S.E M.Sc	2019	Pengaruh pendapatan asli Desa (paDesa), dana Desa (dd), alokasi	Analisis Metode Dokumentasi	Hasil menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap alokasi belanja Desa dan Bagi Hasil Pajak

			dana Desa (add), dan bagi hasil pajak dan retribusi (bhpr) terhadap alokasi belanja Desa bidang kesehatan		dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi belanja Desa bidang kesehatan
3.	Dizzy Asrinda Siswi Ramadhan, Nur Hisamuddin Moch. Shulthon	2019	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)	Menggunakan Analisis Pengumpulan Data	Hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 yang dilakukan menunjukkan dari aspek kemandirian masih sangat rendah yaitu sebesar 3,04% (2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih kurang baik yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% (2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). Aspek
4.	Nikadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta	2022	Analisis kinerja keuangan Desa dengan menggunakan rasio	Analisis yang metode yang digunakan adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun

			keuangan daerah pada pemerintah Desa pejarakan, Kecamatan gerokgak, Kabupaten buleleng tahun 2015 – 2019	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif	anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio kemandirian keuangan masih sangat rendah, berdasarkan rasio efektivitas sudah sangat efektif, berdasarkan rasio efisiensi masih kurang efisien, berdasarkan rasio aktivitas, untuk rasio belanja operasi tergolong cukup baik dan rasio belanja modal tergolong baik, berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan pendapatan asli Desa dengan kategori sedang.
5,	Firman syah	2022	Analisis pendapatan dan belanja Desa (studi kasus pada kantor Desa biji nangka Kecamatan sinjai borong)	Menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain, terdapat sumber pendapatan tertinggi dari pendapatan yaitu Pendapatan Transfer pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak

					mandiri karena tidak mencapai 75 % keatas. Dilihat pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 30 %, kemudian pada tahun 2018 rasio yang diperoleh 35 % dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 tingkat persentasenya sebesar 33 %. Tingkat persentasenya menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Biji Nangka termasuk dalam kategori tidak mandiri.
6.	Nurhayati	2019	Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa (apbdes) di Desa bonto tentnga Kabupaten sinjai	Analisis metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah Desa dikatakan mandiri. Dikatakan mandiri, karena mengalami peningkatan rasio dari periode 2016 tingkat rasio 75%, periode 2017 berada pada tingkat rasio 93% dan pada periode 2018 tingkat rasionya 100%. Peningkatan rasio disetiap tahunnya mengartikan bahwa Pemerintah

					Desa Bonto Tengnga Kabupaten Sinjai sudah cukup baik didalam mengelola keuangan Desanya.
7.	Inasia Br Bangun		Analisis pengelolaan alokasi dana Desa (add), dana Desa (dd), dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa kuta galuh Kecamatan tigaderket	Analisis metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa serta waktu pelaporan. Alokasi Dana Desa, dana Desa dan Bagi hasil dan retribusi daerah ke Bupati/Walikota tidak dapat terlaksana dengan tepat waktu.
8.	Muhammad Eko Purnomo	2014	Pengaruh realisasi belanja daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah	Metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis	Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan transfer.
9.	Harmidarto, Dyah Mutiarin	2014	Analisis penganggaran	Metode penelitian	bahwasannya implementasi

			<p>n Belanja Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bantul)</p>	<p>kaualitatif deskriptif</p>	<p>kebijakan penganggaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa utamanya dalam hal terjadi pelampauan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Seharusnya apabila terdapat pelampauan target dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, pada saat Perubahan APBD alokasi anggaran untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari pelampauan pajak daerah dan retribusi daerah harus dianggarkan,</p>
--	--	--	--	-------------------------------	--

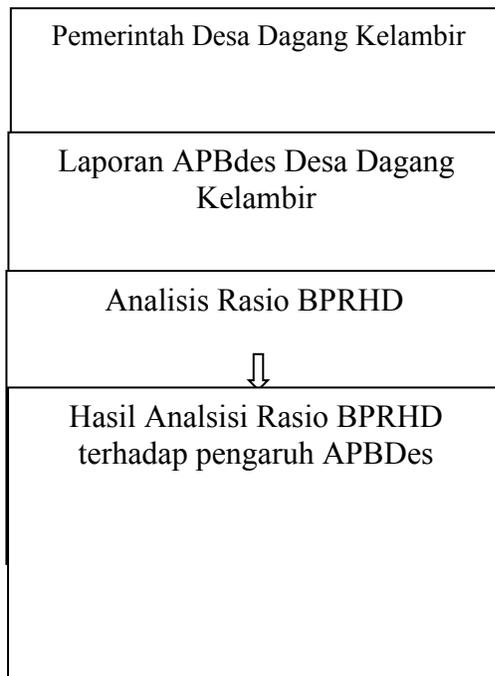
					namun melihat data yang ada pada Perubahan APBD dari Tahun 2015 s/d Tahun 2017 alokasi tersebut tidak dianggarkan
10.	Akhmad Qastalani		Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Latingan Provinsi Kalimantan Tengah	Metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi	Pengelolaan BLT merupakan tanggung jawab Desa untuk setiap warga, namun kita sebagai induk dari Desa yang ada di Katingan mengharapkan agar bantuan tersebut dilaksanakan seratus persen kepada masyarakat dan tepat waktu. Oleh sebab itu Dinas PMD bergerak cepat dalam pelaksanaan pembuatan regulasi apabila program itu ada dan segera di informasikan kepada seluruh perangkat Desa

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari

kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Secara skematis alur kerangka penelitian terdapat dalam gambar kerangka penelitian adalah sebagai berikut:

2.3 Tabel
Kerangka Konseptual



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN